

# ***ANALYSIS OF THE FINANCIAL CAPACITY OF THE REGION IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY (PEKANBARU CITY CASE STUDY 2005-2014***

Rini Maida Putri<sup>1</sup>, Gusnardi<sup>2</sup>, RM Riadi<sup>3</sup>

Email : rinimaida\_putri@ymail.com<sup>1</sup>, gusnardi1967@yahoo.com<sup>2</sup>, rm\_riadi@yahoo.com<sup>3</sup>

No. Hp : 082172279793

Study Program Economic Education  
Faculty of Teachers Training and Education  
Riau University

***Abstract :*** *the research aims to determine finance capacity of Pekanbaru in the implementation of regional autonomy among 2005-2013. This study is a descriptive comparative study with the object of study is Pekanbaru city Central Bureau of Statistics. Secondary data is needed is the realization of the reflected toward budget revenue and expenditure in 2005 – 2014. Methodology of data collection used in this study documentation. Analysis of the data used: 1. The independence ratio of the financial area, 2. The autonomy ratio of the fiscal degree, 3. The index of ratio routine capability, 4. The accord of ratio, 5. The growth of ratio. The result showed: 1. The independence ratio of the financial area is insturctive pattern, 2. The degree of fiscal decentralization are at less intervals that is 17,06%. 3. Ratio routine capability index is less scale that is 23,24%. 4. The accord of ratio showed the result of routine expenditure is greater than the development expenditure amounted to 68,09% and 29,89% of development expenditure. 5. Finally, the growth occurred in positive growth.*

***Keywords :*** *Regional Autonomy, The Capacity Of Local Financial.*

# ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU PERIODE 2005-2014)

Rini Maida Putri<sup>1</sup>, Gusnardi<sup>2</sup>, RM Riadi<sup>3</sup>

Email : rinimaidra\_putri@ymail.com<sup>1</sup>, gusnardi1967@yahoo.com<sup>2</sup>, rm\_riadi@yahoo.com<sup>3</sup>  
No. Hp : 082172279793

**Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau**

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2005-2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan objek penelitian Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. Data sekunder yang dibutuhkan adalah realisasi dari dicerminkan terhadap anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2005 - 2014. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan: 1. Rasio kemandirian daerah keuangan, 2. Rasio Otonomi Fiskal, 3. Indeks kemampuan rasio rutin, 4. Rasio Keserasian, 5. Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Rasio kemandirian daerah keuangan adalah pada pola instruktif yaitu sebesar 19,75%, 2. Rasio derajat otonomi fiskal adalah pada interval kurang yaitu sebesar 17,06%. 3. Rasio indeks kemampuan rutin pada skala kurang yaitu sebesar 20,14%. 4. Rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari pengeluaran pembangunan sebesar 75,48% dan 22,50% dari belanja pembangunan. 5. Terakhir rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang positif.

**Kata kunci :** Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar, sehingga tanggung jawabnya juga akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu berkah untuk daerah tersebut. Namun, disisi lain kewenagngan tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin banyak urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah.

Menurut Nurjuha (dalam Muhammad Rudiyanto, 2015) dalam melaksanakan otonomi daerah, masalah keuangan merupakan pokok pemerintah daerah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan, meskipun diakui berbagai variabel lain yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah seperti sumber daya manusia, organisasi, manajemen sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan daerah kepada pusat, pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki.

Tidak hanya penggunaan atau pengelolaan keuangan daerah yang harus efektif dan efisien. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah juga harus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Syafril Barsi (2011) suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang diumbangkan sekitar 30%. Kondisi yang terjadi di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan daerah otonom dikarenakan PAD Kota Pekanbaru belum optimal di dalam memberikan kontribusi kepada APBD. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Ikhwan

Ratna (2012), dimana PAD kota Pekanbaru tahun 2007 s.d 2010 mempunyai rata-rata 19% dari total penerimaan kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan Pemerintah kota pekanbaru dengan judul **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Pekanbaru Periode 2005-2014).**

## **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 sampai Februari 2017.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka yang kemudian akan dianalisis (Sofar Silaen dan Widiyono,2013). Sumber data yang digunakan yaitu realisasi APBD Kota Pekanbaru dengan rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2005 s.d 2014).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama (Sofar Silaen dan Widiyono,2013).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang telah diolah dengan menggunakan rumus-rumus rasio kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Rasio Kemandirian**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Menurut Mahmudi (2016) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dapat dilihat dari gambar 4.1, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2009 tetapi masih diikuti tingginya dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam menggali potensi daerah. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah, padahal pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah serta menunjukkan tingginya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2005 -2012 rasio kemandirian keuangan masih berkisar 0,00%-25,00%, yang artinya rasio kemandirin keuangan berada dalam pola instruktif. Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dianggap daerah tersebut belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Pada tahun 2013 rasio kemandirian keuangan senilai 28,62 % dan pada tahun 2014 senilai 29,82 %.

Selama sepuluh tahun terakhir Bantuan Pemerintah/Pinjaman lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa daerah Kota Pekanbaru masih sangat tergantung pada bantuan Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 4.1 Rasio Kemandirian Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2005 s.d 2014

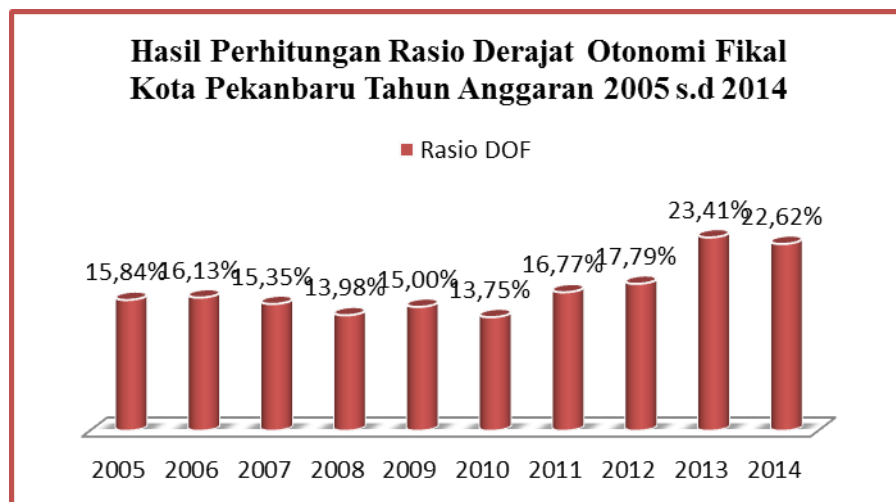
## B. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung DOF adalah :

$$DOF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dapat dilihat dari gambar 4.2, kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil perhitungan rasio otonomi fiskal menunjukkan bahwa kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada tahun 2005-2012 masih kurang karena berada pada interval 10,01% - 20,00% , sedangkan pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan persentase menjadi 23,41 % pada tahun 2013 dan 22,62% pada tahun 2014 yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dianggap cukup karena berada pada interval 20,01% - 30,00%. Berdasarkan jumlah rata-rata rasio derajat otonomi fiskal kemampuan keuangan Kota Pekanbaru masih berada pada tingkat kemampuan yang kurang yaitu, sebesar 17,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri, dengan kata lain masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.



Gambar 4.2 Rasio Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekanbaru  
tahun Anggaran 2005 s.d 2014

### C. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat dinas-dinas yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Indeks Kemampuan rutin (IKR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKR = \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$$

Berdasarkan gambar 4.3 , dimulai dari tahun 2005 s.d 2007 terjadi penurunan indeks kemampuan rutin terus menerus hingga mencapai titik 13,52% pada tahun 2007 yang artinya kemampuan keuangan dalam skala sangat kurang dilihat dari interval 0,00% - 20,00%. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan tetapi masih dalam interval 0,00% - 20,00%, sama halnya dengan tahun 2009 s.d 2010. Pada tahun 2011 s.d 2014 indeks kemampuan rutin mengalami peningkatan terus – menerus meskipun kemampuan keuangannya masih dikatagorikan kurang.



Gambar 4.3 Rasio Indeks KemampuanRutin Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2005 s.d 2014.

#### D. Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2016) rumus yang digunakan dalam analisa rasio keserasian adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Belanja\ Operasional = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ APBD}$$

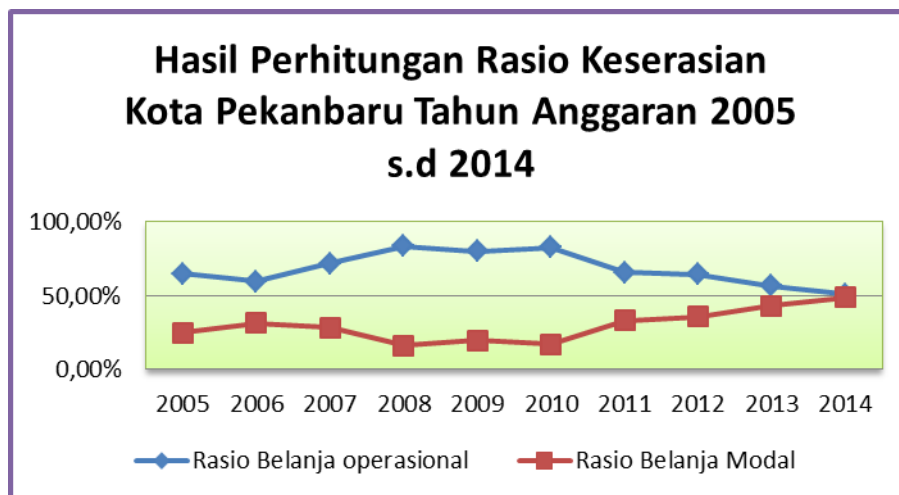
$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa belanja operasional atau belanja rutin dan belanja pembangunan atau belanja modal mempunyai jarak yang cukup besar tahun ke tahun dikarenakan total belanja rutin lebih besar pada belanja pembangunan. Pada tahun 2005 rasio belanja operasional sebesar 64,72 % dan rasio belanja modal 25,07% terdapat *gap* sebesar 39,65%. Pada tahun 2006 mengalami rasio operasional mengalami penurunan sebesar 5,21% yaitu dari 64,72% menjadi 59,51% tetapi berbeda dengan rasio belanja modal yang mengalami peningkatan sebesar 6,30% yaitu dari 25,07% menjadi 31,37 %. Pada tahun 2007 s.d 2014 belanja operasional terus mengalami

penurunan berbanding terbalik dengan belanja modal yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 implikasi dari pemberian wewenang otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya :

- 1) Mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
- 2) Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang
- 5) Meningkatkan pendapatan asli daerah
- 6) Mendorong kegiatan investasi



Gambar 4.4 Rasio Kesenjangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2005 s.d 2014

#### E. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

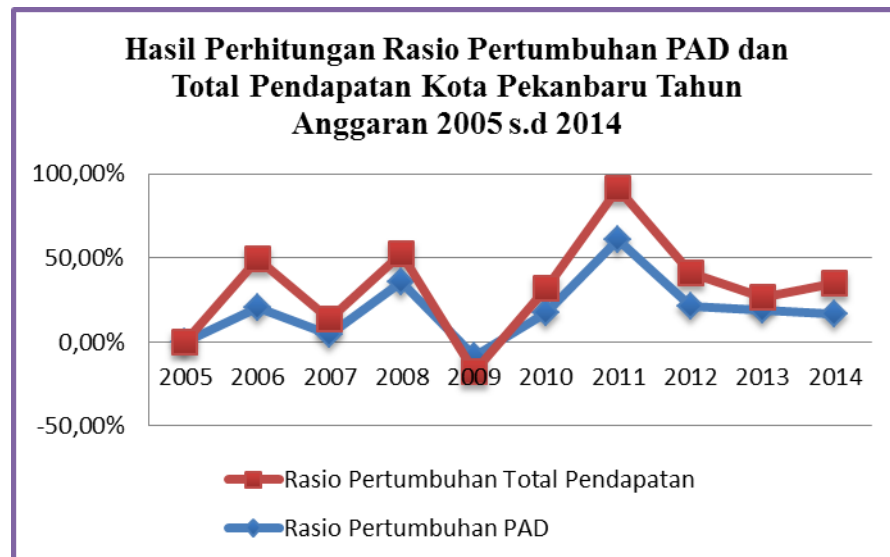
Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Berdasarkan gambar 4.5 pertumbuhan APBD Kota Pekanbaru yang dilihat dari komponen PAD dan total pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mengalami rata - rata positif, meskipun pada tahun 2009 pertumbuhan PAD negatif sebesar -8,80% dan total pendapatan negatif sebesar -8,63%. Hal ini dikarenakan pada

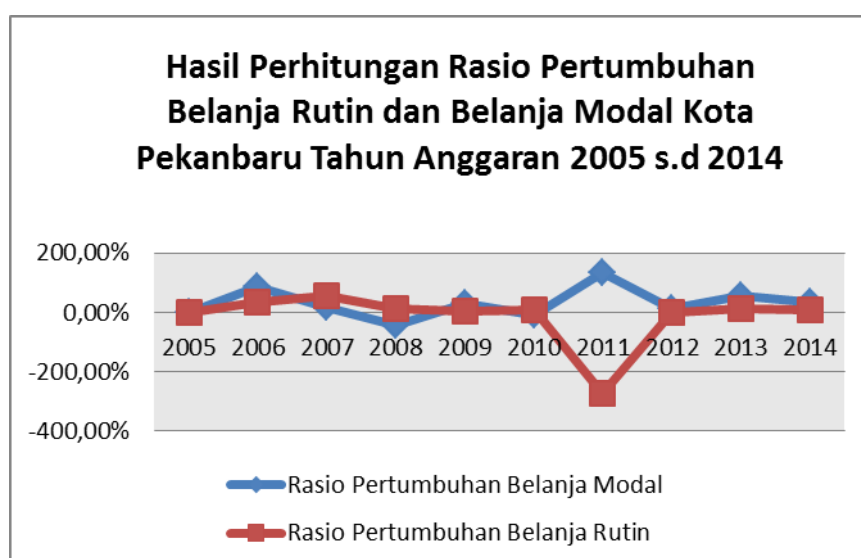


tahun 2009 terjadinya penurunan PAD pada sektor Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, yang pada tahun 2008 sebesar Rp 41.823.280.533 menjadi Rp 18.547.115.964 pada tahun 2009 dan juga terjadi penurunan pada Pendapatan Transfer seperti yang terlihat dalam lampiran 4 dan 5.



Gambar 4.5 Rasio Pertumbuhan PAD dan Total Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2005 s.d 2014.

Terlihat jelas selama sepuluh tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan daerah, yang mana pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat tinggi dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang sangat tinggi juga. Selain rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan daerah akan dihitung juga rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja modal seperti yang terlihat pada gambar 4.6 di bawah ini.



**Gambar 4.6 Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin dan Belanja Modal  
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2005 s.d 2014**

Dapat dilihat dari gambar 4.6 bahwa pada tahun 2006 rasio pertumbuhan belanja modal berada pada puncaknya, tetapi pada tahun 2008 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar -45,26% dibandingkan pada tahun 2007 yang rasionya sebesar 17,60%, terjadi perbedaan sebesar 27,66%. Hal ini berarti pada tahun 2008 pembangunan daerah Pekanbaru sangat minim padahal pada tahun 2008 total pendapatan daerah lebih besar dari pada tahun 2007 seperti yang terlihat pada gambar 4.5.

Dengan mengetahui pertumbuhan masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi – potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan keuangan pemerintah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan otonomi daerah periode 2005 s.d 2014 masih dapat dibilang kurang mampu dikarenakan masih besarnya bantuan dari pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan pemerintah daerah itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari rasio kemandirian sebesar 19,75%, rasio DOF sebesar 17,06%, rasio IKR sebesar 23,24%, rasio keserasian belanja operasional sebesar 68,09%, rasio keserasian belanja modal sebesar 29,89%, rasio pertumbuhan PAD sebesar 18,69%, rasio pertumbuhan total pendapatan sebesar 13,66% rasio pertumbuhan belanja operasional sebesar 13,53% dan rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 31,72%. Untuk itu perlu adanya peningkatan diberbagai sektor khususnya peningkatan PAD agar kota Pekanbaru bisa menjadi kota yang otonominya mandiri.

### **Rekomendasi**

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sumber daya daerah itu sendiri dengan cara pengoptimalan pada terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi akademi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk dalam mempelajari teori – teori yang berhubungan dengan otonomi daerah dan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Addul Halim dan M.Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Anjar Nora Vuryy,dkk. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trand pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. *Jurnal Jurusan Manajemen 2* (1). Manajemen Unversitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Astraiana nabila Muhibtari. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Pekanbaru Dalam Angka 2005 s.d 2014*. BPS Provinsi Riau.
- Chairul Adhim. 2014. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2*(2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Darril Munir,dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keungan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Yogyakarta.
- Gustra Arianda,dkk. 2014. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Natuna. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 1* (2). Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Haw Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikhwani Ratna. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah Pada Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah 3* (1). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim. Pekanbaru.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Stategi, dan Peluang*. Erlanga. Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2011. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad Rudianto. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimea Yogyakarta dan Provinsi Banten)*. Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oesi Agustina. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat kemandirian Daerah di era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang ( Tahun Anggaran 2007-1011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1(2). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Riwu Kaho Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sofar Silaen dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media. Jakarta.
- Syafril Basri. 2011. Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi* 19 (1). Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tathun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.